

## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan penulis secara khusus pada Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dipilihnya pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai tempat penelitian dikarenakan sampai saat ini pengelolaan keuangan dan kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih rendah, sesuai dengan yang disampaikan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK).

Objek penelitian bagi penulis adalah mengenai penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah. Pada Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah, penulis berfokus pada penerapan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban laporan keuangan.

#### **3.2 Tinjauan Umum Pemerintah Provinsi Jawa Barat**

##### **3.2.1 Sejarah Singkat Daerah Provinsi Jawa Barat**

Perkembangan Sejarah menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi yang pertama dibentuk di wilayah Indonesia. Propinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan UU No.11 Tahun 1950, tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat. Selama lebih kurang 50 tahun sejak pembentukannya, wilayah Kabupaten / Kota di Jawa Barat baru bertambah lima wilayah, yakni Kabupaten Subang (1968), Kota Tangerang (1993), Kota Bekasi (1996), Kota Cilegon dan Kota Depok (1999). Padahal dalam kurun waktu tersebut telah banyak perubahan baik dalam bidang pemerintah, ekonomi, maupun kemasyarakatan.

Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki alam dan pemandangan yang indah serta memiliki berbagai potensi yang dapat diberdayakan, antara lain menyangkut Sumber Daya Air, Sumber Daya Alam,

Pemanfaatan Lahan, Sumber Daya Hutan, Sumber Daya Pesisir dan Laut serta Sumber Daya Perekonomian.

Dalam kurun waktu 1994-1999, secara kuantitatif jumlah wilayah Pembantu Gubernur tetap lima wilayah dengan terdiri dari : 20 kabupaten dan lima kotamadya, dan tahun 1999 jumlah kotamadya bertambah menjadi delapan kotamadya. Kota administratif berkurang dari enam daerah menjadi empat, karena Kota Depok pada tahun 1999 berubah status menjadi kota otonom.

Adanya lahirnya UU No.23 Tahun 2000 tentang Provinsi Banten, maka Wilayah Administrasi Pembantu Gubernur Wilayah I Banten resmi ditetapkan menjadi Provinsi Banten dengan daerahnya meliputi : Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten/Kota Tangerang serta Kota Cilegon. Adanya perubahan itu, maka saat ini Provinsi Jawa Barat terdiri dari : 17 Kabupaten dan sembilan Kotamadya, dengan membawahkan 592 Kecamatan, 5.201 Desa dan 609 Kelurahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 60 Sekretariat Daerah merupakan salah satu unsur perangkat Daerah, yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 pasal 68 ayat 1 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 pasal 1 ayat 2 yang kemudian dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Sekretariat Daerah.

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 6 ayat (1) Sekretaris daerah merupakan koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Provinsi Jawa Barat, sejak berdirinya sampai sekarang telah dipimpin oleh 12 orang Gubernur, yaitu : M Sutardjo Kertohadikusumo (1945-1946), Mr.Datuk Djamin (1946), R. Mas Sewara (1946-1952), Mohamad Sanusi Hardjadinata (1952-1956), Ipik Gandamana (1956-1960), H. Mashudi (1960-1970), Solihin GP (1970-1975), H. Aang Kunaefi (1975-11985), HR.Yogie SM (1985-1993),

R.Nuriana (1993-2003), H.Danny Setiawan (2003 – 2008) dan H. Ahmad Haryawan (2008-sekarang).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terdiri dari unsur Sekretariat Daerah (Setda) yang dipimpin oleh Sekertaris Daerah dan dibantu oleh Assisten-Assisten Sekretaris Daerah (Asda) yang terdiri dari : Pemerintahan Hukum dan HAM, Perekonomian dan Pembangunan, Adminsitrasi, Kesejahteraan Rakyat. Serta biro-biro yang seluruhnya terdiri dari 12 biro , 21 Dinas , 14 Badan , 1 Kantor Perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Barat.

### **3.2.2 Visi dan Misi Provinsi Jawa Barat**

#### **3.2.2.1 Visi Provinsi Jawa Barat**

Mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Jawa Barat serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat adalah :

**“Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera”.**

Penjabaran makna dari Visi Jawa Barat tersebut adalah sebagai berikut :

- Mandiri** : sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pelayanan publik berbasis *e-government*, energi, infrastruktur, lingkungan dan sumber daya air.
- Dinamis** : sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara aktif mampu merespon peluang dan tantangan zaman serta berkontribusi dalam proses pembangunan.
- Sejahtera** : sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan.

### 3.2.2.2 Misi Provinsi Jawa Barat

Dalam rangka mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka rumusan Misi Provinsi Jawa Barat dalam rangka pencapaian Visi Jawa Barat 2013 ditetapkan dalam lima misi berikut ini, untuk mencapai masyarakat Jawa Barat yang mandiri, dinamis dan sejahtera. Misi tersebut ialah :

- 1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing.
- 2) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal.
- 3) Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah.
- 4) Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.
- 5) Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi.

Dalam rangka mewujudkan ke 5 (lima) misi tersebut, didasarkan pada nilai-nilai agama dan budaya daerah, dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan, sebagai berikut :

- 1) *Good Governance* (tata kelola pemerintahan), yaitu pengelolaan dan kepengurusan pemerintahan yang baik bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang solid, bertanggung jawab, efektif dan efisien, dengan menjaga keserasian interaksi yang konstruktif di antara *domain* negara, swasta dan masyarakat.
- 2) *Integrity* (integritas), yaitu suatu kesatuan perilaku yang melekat pada prinsip-prinsip moral dan etika, terutama mengenai karakter moral dan kejujuran, yang dihasilkan dari suatu sistem nilai yang konsisten.
- 3) *Quality and Accountability* (mutu dan akuntabilitas), yaitu suatu tingkatan kesempurnaan, merupakan karakteristik pribadi yang mampu memberikan hasil yang melebihi kebutuhan atau pun harapan, dan sebuah bentuk tanggung jawab untuk suatu tindakan, keputusan dan kebijakan yang telah

mempertimbangkan mengenai aturan, pemerintahan dan implementasinya, dalam pandangan hukum dan tata kelola yang transparan.

- 4) Pemerataan pembangunan yang berkeadilan, yaitu upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan antarwilayah, dan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, melalui pemenuhan kebutuhan akses pelayanan sosial dasar termasuk perumahan beserta sarana dan prasarannya, serta memberikan kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran dengan menyeimbangkan pengembangan ekonomi skala kecil, menengah, dan besar.

### **3.2.3 Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat**

Struktur organisasi dibuat untuk memberikan kejelasan mengenai pembagian tugas, fungsi, wewenang, tanggungjawab, serta hubungan antara satu unit organisasi dengan organisasi lainnya. Dengan struktur organisasi tiap-tiap orang yang diangkat dalam jenjang kepemimpinan organisasi akan tahu dimana letak peranannya di dalam organisasi tersebut.

Pemerintahan Provinsi dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut Gubernur. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah atau disebut Wakil Gubernur. Untuk membantu tugasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibentuk suatu organisasi atau perangkat daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah (Gubernur). Perangkat daerah tersebut terdiri dari sekretariat daerah, dinas, dan lembaga teknis.

Sekretariat Daerah (Setda) merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur. Sekretaris Daerah dibantu oleh beberapa asisten dan membawahi beberapa biro. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana

otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala daerah. dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan atau kantor. Lembaga Teknis Daerah dipimpin oleh kepala badan atau kepala kantor, yang juga bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

### **3.2.4 Tugas dan Fungsi Pemerintah Provinsi Jawa Barat**

#### **3.2.4.1 Gubernur dan Wakil Gubernur**

Gubernur yang jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Wakil pemerintah sebagaimana dimaksud adalah perangkat pemerintah pusat dalam rangka dekonsentrasi. Dalam kedudukannya tersebut, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat adalah:

- 1) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten / kota.
- 2) koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten / kota.
- 3) koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten / kota.

### 3.2.4.2 Sekretariat Daerah

Tugas pokok sekretariat daerah yaitu membantu Gubernur dalam pelaksanaan tugas pemerintah, organisasi dan tata laksana serta memberi pelayanan administratif kepada seluruh perangkat pemerintah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya tersebut, Sekretariat Daerah juga berfungsi sebagai:

- 1) Pengkoordinasi perumusan kebijakan pemerintah daerah.
- 2) Penyelenggaraan administrasi pemerintah dan pelaksanaan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat pemerintah daerah.
- 3) Pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah daerah.
- 4) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dengan tugas dan fungsinya.

Dalam membantu Sekretaris Daerah dalam menjalankan tugasnya, dibenuk beberapa Assisten Pemerintah Daerah (Asda) yang diantaranya ialah :

- 1) Assisten Pemerintahan, Hukum Dan HAM

Assisten Pemerintahan, membawahi beberapa biro, yaitu :

- (1) Biro Pemerintahan Umum
- (2) Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama
- (3) Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Jawa Barat

Fungsi :

- a. Pengkajian bahan kebijakan umum di bidang penataan hokum.
- b. Penyelenggaraan koordinasi perumusan perundang-undangan.
- c. Penyelenggaraan koordinasi bantuan hukum serta perlindungan HAM.
- d. Penyelenggaraa koordinasi pengembangan hokum.
- e. Fasilitas perumusan perundang-undangan

## 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi beberapa biro, yaitu :

### (1) Biro Administrasi Perekonomian

Fungsi :

- a. Pengkajian bahan kebijakan umum di bidang pengembangan perindustrian dan perdagangan dan UKM serta pariwisata dan seni budaya yang bernilai ekonomi.
- b. Pengkajian bahan kebijakan umum di bidang usaha daerah, lembaga keuangan dan investasi.
- c. Pengkajian bahan kebijakan umum di bidang perhubungan, kebinamargaan dan sumber daya air.
- d. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan sarana perekonomian dalam rangka pemberdayaan ekonomi daerah.

### (2) Biro Bina Produksi

### (3) Biro Administrasi Pembangunan

## 3) Asisten Kesejahteraan Rakyat

Asisten Kesejahteraan Rakyat membawahi beberapa biro, yaitu :

### (1) Biro Pelayanan Sosial Dasar

### (2) Biro Pengembangan Sosial

## 4) Asisten Administrasi

Asisten Administrasi membawahi beberapa biro, yaitu :

### (1) Biro Pengelolaan Barang Daerah

Dalam pengelolaan barang daerah, Biro Perlengkapan sebagai pembantu Kuasa Barang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang daerah. Biro Perlengkapan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berupaya aktif memberikan kontribusi terhadap tercapainya visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pelayanan prima kepada unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

(2) Biro Humas, Protokol dan Umum

Fungsi

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan Tata Usaha & Protokol, Rumah Tangga, Keuangan, Setda, Hubungan Masyarakat, Sandi & Telekomunikasi.
- b. Penyajian bahan penetapan kebijakan penyelenggaraan Tata Usaha & Protokol, Rumah Tangga, Keuangan Setda, Hubungan Masyarakat, Sandi & Telekomunikasi.
- c. Penyiapan bahan petunjuk teknis penyelenggaraan Tata Usaha dan Protokol, Sandi Telekomunikasi dan Hubungan Masyarakat.
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan layanan kebutuhan kerumahtanggaan
- e. Penyelenggaraan dan pengendalian urusan keuangan Setda.
- f. Pelaksanaan layanan kebutuhan kerumahtanggaan, dan Hubungan Masyara

(3) Biro Organisasi Setda

Fungsi :

- a. Pengkajian bahan telaahan serta pembinaan kelembagaan perangkat daerah
- b. Pengkajian bahan telaahan, penyempurnaan, penyusunan analisis pengembangan ketatalaksanaan perangkat daerah
- c. Pengkajian bahan telaahan analisis jabatan, inventarisasi, penggolongan, evaluasi struktur jabatan dan beban kerja jabatan struktural, jabatan fungsional serta jabatan non struktural pada perangkat daerah
- d. Penatausahaan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi organisasi dan ketatalaksanaan sekretariat daerah

#### (4) Biro Keuangan

Biro Keuangan mempunyai tugas pokok dalam mengkoordinasikan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi keseluruhan kegiatan dalam rangka proses pelaksanaan administrasi APBD, yang terdiri dari:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pertanggungjawaban

fungsi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan Penyusunan APBD.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan Penyusunan APBD, meliputi kegiatan penatausahaan sampai dengan pengendalian administrasi pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Mengkoordinasikan perhitungan APBD dalam rangka laporan pertanggungjawaban Gubernur dan khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di Bidang Keuangan Daerah.
- d. Melaksanakan pengendalian/pengawasan preventif pelaksanaan APBD.
- e. Menyelenggarakan pembinaan kepada aparat pengelolaan keuangan daerah secara teknis fungsional dalam pengurusan keuangan secara khusus.

#### 3.2.4.3 Dinas Daerah

Mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Daerah Provinsi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi. Dinas-dinas yang ada di Provinsi Jawa Barat, ialah :

- 1) Dinas Kesehatan
- 2) Dinas Pendidikan
- 3) Dinas Sosial
- 4) Dinas Pertanian Tanaman Pangan
- 5) Dinas Peternakan
- 6) Dinas Perikanan dan Kelautan
- 7) Dinas Kehutanan
- 8) Dinas Perkebunan
- 9) Dinas Perhubungan
- 10) Dinas Permukiman dan Perumahan
- 11) Dinas Bina Marga
- 12) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
- 13) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- 14) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
- 15) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- 16) Dinas Pendapatan Daerah
- 17) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 18) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 19) Satuan Polisi Pamong Praja
- 20) Dinas Olah Raga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat
- 21) Dinas Komunikasi dan Informatika

#### **3.2.4.4 Lembaga Tehnis Daerah**

Lembaga Tehnis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, juga melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh sekretariat daerah dan dinas daerah dalam lingkup tugasnya.

Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, serta penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Lembaga Tehnis Daerah terdiri dari beberapa bentuk, diantaranya berupa lembaga dan badan. Lembaga yang dibentuk di Provinsi Jawa Barat ialah Lembaga Kantor Perwakilan Pemerintah Jawa Barat. Juga dibentuk beberapa badan, diantaranya :

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
- 2) Inspektorat Provinsi Jawa Barat
- 3) Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
- 4) Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah
- 5) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
- 6) Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Daerah
- 7) Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah dan Pemerintahan Desa
- 8) Badan Ketahanan Pangan
- 9) Badan Koordinasi Pemerintah dan Pembangunan Wilayah I
- 10) Badan Koordinasi Pemerintah dan Pembangunan Wilayah II
- 11) Badan Koordinasi Pemerintah dan Pembangunan Wilayah III
- 12) Badan Koordinasi Pemerintah dan Pembangunan Wilayah IV
- 13) Badan Kepegawaian Daerah
- 14) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

### **3.2.5 Struktur Organisasi Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat**

Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (SPKPD), merupakan sekumpulan elemen yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan yang meliputi seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pengelolaan keuangan ini dijalankan oleh biro keuangan, dimana biro keuangan sebagai bagian yang mengurus seluruh kegiatan keuangan, dari mulai penganggaran hingga akhir pelaporan dan pertanggungjawaban.

Struktur organisasi di Biro Keuangan yang baru sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

Biro Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Biro Keuangan yang membawahi beberapa bagian, yaitu:

- 1) Bagian Anggaran, membawahkan:
  - a. Subbagian Anggaran Program.
  - b. Subbagian Anggaran Non Program.
  - c. Subbagian Evaluasi dan Pembinaan.
- 2) Bagian Perbendaharaan, membawahkan:
  - a. Subbagian Perbendaharaan Belanja Program.
  - b. Subbagian Perbendaharaan Belanja Non Program.
  - c. Subbagian Belanja Pegawai.
- 3) Bagian Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan:
  - a. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.
  - b. Subbagian Akuntansi dan Inventarisasi Aset.
  - c. Subbagian Evaluasi dan Pembinaan.
- 4) Bagian Kas Daerah, membawahkan:
  - a. Subbagian Pengelolaan Kas.
  - b. Subbagian Penerimaan.
  - c. Subbagian Pengeluaran.
- 5) Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah, membawahkan:
  - a. Subbagian Penganggaran.
  - b. Subbagian Penatausahaan.
  - c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

### **3.2.5.1 Deskripsi Jabatan**

Tugas pokok, fungsi serta rincian tugas Biro Keuangan diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2009 pasal 131. Tugas pokok Biro Keuangan adalah menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi anggaran, perbendaharaan,

akuntansi dan pelaporan, kas daerah dan administrasi keuangan Sekretariat Daerah.

Adanya menyelenggarakan tugas pokok diatas, Biro Keuangan mempunyai fungsi:

- 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, kas daerah dan administrasi keuangan Sekretariat Daerah;
- 2) Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, kas daerah dan administrasi keuangan Sekretariat Daerah;
- 3) Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, kas daerah dan administrasi keuangan Sekretariat Daerah.

Sedangkan rincian tugas Biro Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Biro Keuangan;
- 2) Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi serta fasilitasi anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, kas daerah dan administrasi keuangan Sekretariat Daerah;
- 3) Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi anggaran;
- 4) Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi perbendaharaan;
- 5) Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi akuntansi dan pelaporan;
- 6) Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kas daerah;
- 7) Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi administrasi keuangan Sekretariat Daerah;
- 8) Menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah;
- 9) Menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan APBD;
- 10) Menyelenggarakan pengendalian anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, kas daerah dan administrasi keuangan Sekretariat Daerah;

- 11) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 12) Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
- 13) Menyelenggarakan ketatausahaan Biro;
- 14) Menyelenggarakan perumusan bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan LPPD Biro;
- 15) Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Biro Keuangan;
- 16) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 17) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tugas pokok, fungsi serta rincian tugas Bagian Akuntansi dan Pelaporan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2009 pasal 140. Tugas pokok Bagian Akuntansi dan Pelaporan adalah menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi akuntansi dan pelaporan, akuntansi dan inventarisasi aset, evaluasi dan pembinaan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- 1) Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum akuntansi dan pelaporan, akuntansi dan inventarisasi aset, evaluasi dan pembinaan;
- 2) Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi akuntansi dan pelaporan, akuntansi dan inventarisasi aset, evaluasi dan pembinaan;
- 3) Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi akuntansi dan pelaporan, akuntansi dan inventarisasi aset, evaluasi dan pembinaan.

Sedangkan rincian tugas Bagian Akuntansi dan Pelaporan adalah:

- 1) Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bagian Akuntansi dan Pelaporan;

- 2) Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum akuntansi keuangan daerah;
- 3) Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum pelaporan keuangan daerah;
- 4) Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi akuntansi dan pelaporan;
- 5) Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi akuntansi dan inventarisasi;
- 6) Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi evaluasi dan pembinaan;
- 7) Menyelenggarakan pengkajian bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 8) Menyelenggarakan pengkajian sistem informasi keuangan;
- 9) Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
- 10) Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum pembinaan pengelolaan keuangan daerah akuntansi dan pelaporan;
- 11) Menyelenggarakan fasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 12) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- 13) Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
- 14) Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bagian Akuntansi dan Pelaporan;
- 15) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 16) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Selain mengatur tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas Biro Keuangan dan Bagian Akuntansi dan Pelaporan, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2009 juga mengatur tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas sub-sub bagian

dari Bagian Akuntansi dan Pelaporan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 141 - Pasal 143.

1) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan

Tugas pokok: melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi pelaporan serta evaluasi akuntansi dan pelaporan.

Fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan umum akuntansi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi akuntansi dan pelaporan;
- c. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi akuntansi.

Rincian tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Akuntansi dan Pelaporan;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan akuntansi dan pelaporan;
- d. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara berkala;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan konsolidasi atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan nota pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- g. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Akuntansi dan Pelaporan;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## 2) Subbagian Akuntansi dan Inventarisasi Aset

Tugas pokok: melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi akuntansi dan hasil inventarisasi aset serta sistem informasi keuangan.

Fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan umum akuntansi dan hasil inventarisasi aset serta sistem informasi keuangan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi akuntansi dan hasil inventarisasi aset serta sistem informasi keuangan;
- c. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi akuntansi dan hasil inventarisasi aset serta sistem informasi keuangan.

Rincian tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Akuntansi dan Inventarisasi Aset;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum akuntansi dan hasil inventarisasi aset;
- c. Melaksanakan penyusunan dan perumusan akuntansi aset;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi akuntansi aset;
- e. Melaksanakan penyusunan dan perumusan penyajian informasi keuangan daerah;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi akuntansi dan hasil inventarisasi aset serta sistem informasi keuangan;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## 3) Subbagian Evaluasi dan Pembinaan

Tugas pokok: melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi dan pembinaan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD OPD dan Kabupaten/Kota.

Fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan umum evaluasi dan pembinaan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD OPD dan Kabupaten/Kota;
- b. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD OPD dan Kabupaten/Kota;
- c. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi dan pembinaan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD OPD dan Kabupaten/Kota.

Rincian tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Evaluasi dan Pembinaan;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum evaluasi dan pembinaan laporan keuangan daerah OPD dan Kabupaten/Kota;
- c. Melaksanakan penelaahan bahan Rancangan Peraturan Daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
- d. Melaksanakan pembinaan APBD bidang pelaporan keuangan daerah;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Evaluasi dan Pembinaan;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **3.3 Metode Penelitian**

Metode merupakan cara yang teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai hasil yang baik seperti yang dikehendaki (**J.S. Badudu & Sutan M Zain**, 1994:896). Penelitian merupakan usaha penyelidikan yang sistematis dan terorganisir dan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan (**Nur Indriantoro dan Bambang Supomo**, 2002:3). Sedangkan metode penelitian adalah prosedur atau cara-cara tertentu yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang disebut ilmu (**Nur Indriantoro dan Bambang Supomo**, 2002:4)

Penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif, yang mana menurut Moh Nazir (2003;54) adalah :

“Suatu metode yang bertujuan memberikan gambaran dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu sistem kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa mendatang”.

Metode penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha mengumpulkan, menyajikan serta menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai objek diteliti untuk membuat suatu kesimpulan yang umum.

Penelitian pada skripsi ini dilakukan secara langsung pada perusahaan yang diteliti dengan maksud agar diperoleh data yang relevan sehingga merupakan studi kasus.

### **3.3.1 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik penelitian yang digunakan untuk memperoleh data adalah sebagai berikut :

#### **3) Penelitian lapangan (*Field Research*)**

Merupakan penelitian yang dilakukan terhadap objek penelitian secara langsung guna mengelola data primer yang diperlukan, yaitu dengan cara :

##### **d. Observasi**

Dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek yang diteliti. Dalam hal ini penulis melihat secara langsung kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

##### **e. Wawancara**

Yaitu suatu tehnik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pejabat atau instansi yang berwenang atau bagian lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

f. Kuesioner

Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mengumpulkan pertanyaan terstruktur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4) Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai sumber dan mempelajari literature-literatur, catatan-catatan kuliah serta sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan topik pembahasan untuk memperoleh dasar teoritis, agar diperoleh sebuah pemahaman yang mendalam dalam menunjang proses pembahasan mengenai masalah-masalah yang diidentifikasi.

### 3.3.2 Operasional Variabel Penelitian

Operasional variable dilakukan untuk mengetahui jenis dan indikator dari variable-variable yang terkait dalam penelitian ini. Selain itu, proses ini juga dimaksud untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variable sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu statistik dapat dilakukan secara luas.

Sesuai dengan judul skripsi yang diambil yaitu “Peran Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”, maka Operasional variable, yaitu :

1) Variabel Bebas (*Independent Variabel*)

Yang menjadi variable bebas dalam penelitian ini adalah Peran Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah karena variable ini akan mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan.

2) Variabel Tidak Bebas (*Dependent Variabel*)

Untuk variable tidak bebas dalam penelitian ini adalah Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Tabel 3-1

## Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Ukuran Skala	Instrumen
Variabel X Peran Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	SPKPD yang berfokus pada pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, dengan menggunakan prinsip akuntansi dan pelaporan sesuai dengan (SAP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Basis akuntansi</li> <li>- Prinsip nilai historis</li> <li>- Prinsip realisasi</li> <li>- Prinsip substansi mengungguli bentuk formal</li> <li>- Prinsip periodisitas</li> <li>- Prinsip Konsistensi</li> <li>- Prinsip penggunaan lengkap</li> <li>- Prinsip penyajian wajar</li> </ul>	Ordinal	Kuesioner
Variabel Y Kualitas pelaporan keuangan	Relevan	Memiliki umpan balik. Tepat waktu. Lengkap. Memiliki manfaat prediktif.	Ordinal	Kuesioner
	Andal	Penyajian jujur. Dapat diverifikasi. Netralitas.	Ordinal	Kuesioner
	Dapat dibandingkan	Memiliki perbandingan baik interen maupun eksteren	Ordinal	Kuesioner
	Dapat dipahami	Mudah dipahami dalam laporan keuangan.	Ordinal	Kuesioner

### 3.3.3 Sample

Populasi dari penelitian ini adalah para pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat di biro keuangan yang terdiri dari 40 pegawai. Untuk menentukan berapa banyak sample minimal yang dibutuhkan jika populasi diketahui, menurut Husein Umar (2002;141) dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N (e^2)}$$

Dimana :

N : Ukuran Populasi

n : Ukuran Sample

e : Kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan beberapa sample yang masih dapat ditolerir (batas kesalahan kurang dari 10%)

Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah koresponden sebesar 28 orang, maka penulis mengambil sample sebanyak 30 orang dirasa sudah cukup untuk mewakili populasi.

### 3.3.4 Teknik Pengembangan Instrumen

Sesuai dengan pengertiannya instrumen merupakan alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu (J.S. Badudu & Sultan M Zain, 1994:535). Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah kuesioner.

Adapun kuesioner yang akan digunakan penulis dalam pengumpulan data terdiri atas dua bagian yaitu :

#### 1) Pertanyaan Umum

Pertanyaan umum dibuat dalam bentuk pertanyaan terbuka, menyangkut identitas responden diantaranya : nama, jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan terakhir, lama bekerja, yang jawabannya tidak ditentukan terlebih dahulu dan responden bebas menentukan jawabannya.

## 2) Pernyataan Khusus

Pernyataan khusus adalah pernyataan yang berkaitan dengan Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (SPKPD) yang memfokuskan pada sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaporan keuangan, dan kualitas pelaporan keuangan dalam bentuk pernyataan yang tertutup, yaitu menggunakan variasi jawaban yang sudah ditentukan terlebih dahulu.

Dari jawaban pernyataan khusus, setiap item dari kuesioner tersebut memiliki lima jawaban dengan masing-masing nilai yang berbeda, dan untuk menentukan nilai atau skor kuesioner, penulis menggunakan Skala Likert. Cara pengukuran adalah dengan menghadapkan seorang responden dengan sebuah pernyataan dan kemudian diminta untuk memberikan jawaban. Jawaban-jawaban ini diberi skor 1 sampai 5.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka penulis menetapkan nilai-nilai jawaban sebagai berikut:

<b>Variabel Independen</b>	<b>Bobot</b>
Sangat Diterapkan	5
Diterapkan	4
Kurang Diterapkan	3
Tidak Diterapkan	2
Sama Sekali Tidak Diterapkan	1

Variabel Dependen	Bobot
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Kurang Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Setelah itu, nilai-nilai dari jawaban yang diperoleh tersebut kemudian di proses dan diolah untuk digunakan sebagai alat ukur variabel-variabel dalam penelitian ini. Hasilnya akan digunakan untuk menganalisa hubungan antara Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (SPKPD) yang memfokuskan pada sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaporan keuangan terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah. Dalam hal ini digunakan analisa kuantitatif, yaitu analisa statistik berupa analisa koefisien korelasi rank spearman dan pengujian hipotesis. Penggunaan analisa koefisien korelasi rank spearman adalah untuk menguji hubungan yang asimetri antara kedua variabel tersebut.

### **3.3.5 Rancangan Analisis Data dan Pengujian Hipotesis**

Pengujian data yang telah terkumpul, untuk mengetahui apakah data yang diteliti tersebut dapat menjamin mutu penelitian. Alat penelitian yang digunakan dengan menggunakan penyebaran kuesioner. Untuk mengetahui mutu penelitian, dilakukan pengujian validitas dan reabilitas pada instrument penelitian agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

#### **3.3.5.1 Pengujian Validitas**

Suatu data dikatakan valid apabila diukur dengan alat yang tepat. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui instrumen yang digunakan benar-benar dapat mengukur variabel yang dimaksud. Instrumen yang valid berarti alat ukur digunakan untuk mendapatkan data atau pengukuran yang valid. Menurut Sugiyono (2004:109) mendefinisikan valid sebagai berikut :

“Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur”.

Maka dari itu, untuk mengukur sesuatu harus digunakan instrumen atau alat ukur yang tepat.

Pengujian validitas tiap butir menggunakan analisis item, yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir.

Langkah 1: Menghitung koefisien korelasi (r) Pearson antara skor pertanyaan masing-masing item (sebagai variabel x) dengan skor total yang dihasilkan oleh setiap responden untuk item yang bersangkutan (sebagai variabel y).

Rumus Korelasi *Pearson* Product Moment

$$r_{xy} = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}}$$

Keterangan: x : adalah skor setiap item pernyataan.

y : adalah skor total seluruh item pernyataan.

xy : adalah skor pernyataan dikalikan skor total

Langkah 2: Perhitungan secara statistik dapat dibandingkan dengan tabel r *Product Moment*, pengukurannya yaitu :

Jika r hitung  $\geq$  r tabel, maka item-item kuesioner valid

Jika r hitung  $<$  r tabel, maka item-item kuesioner tidak valid

### 3.3.5.2 Uji Reliabilitas

Menurut **Sugiyono** (2004:110) instrumen yang reliabel adalah sebagai berikut:

“Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama”.

Maka dari itu, suatu instrumen dikatakan reliabel bila digunakan untuk mengukur berkali-kali menghasilkan data yang sama (*konsisten*). Uji reliabilitas dilakukan terhadap item pernyataan yang sudah valid, untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran kembali terhadap gejala yang sama.. Uji ini dilakukan dengan menggunakan teknik belah dua dari *Spearman Brown (Split-half)*, langkah-langkah kerjanya sebagai berikut:

- 1) Menyajikan alat pengukur kepada sejumlah responden, kemudian dihitung validitas itemnya, item-item yang valid dikumpulkan jadi satu, yang tidak valid dibuang.
- 2) Membagi item-item yang valid tersebut menjadi dua belahan dengan cara membagi item ganjil masuk belahan pertama dan item genap masuk belahan kedua.
- 3) Skor untuk masing-masing item pada tiap belahan dijumlahkan, langkah ini akan menghasilkan dua skor total untuk masing-masing responden yakni skor total untuk belahan pertama dan skor total untuk belahan kedua.
- 4) Mengkorelasikan skor total belahan pertama dengan skor belahan kedua,
- 5) Angka korelasi yang diperoleh adalah angka korelasi dari alat pengukur yang dibelah (*split-half*), selanjutnya dicari koefisien reliabilitasnya menggunakan formula *Spearman Brown*, sebagai berikut :

$$r_i = \frac{2.r_b}{1+r_b}$$

Dimana :  $r_i$  = Angka reliabilitas keseluruhan item  
 $r_b$  = Korelasi *product moment* antara belah pertama dan kedua  
 Kemudian perhitungan secara statistik dapat dibandingkan dengan tabel r *Product Moment*, pengukurannya yaitu :

- Jika r hitung  $\geq$  r tabel, maka item-item kuesioner reliabel
- Jika r hitung  $<$  r tabel, maka item-item kuesioner tidak reliabel

### 3.3.5.3 Teknik Analisis Data

Dalam mengetahui seberapa besar dari pengaruh Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (SPKPD) yang memfokuskan pada sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaporan keuangan terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah, digunakan rumus regresi linier sederhana, yaitu :

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n \sum X^2 - (\sum X)^2][n \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

r : Koefisien korelasi regresi linier sederhana

X : Skor pernyataan setiap nomor

Y : Skor Faktor

n : Jumlah Faktor

Tabel 3 - 2  
 Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat kuat

Sumber : Sugiyono "Statistik untuk Penelitian"

Dari hasil analisa tersebut akan diperoleh nilai positif (+) atau nilai negatif (-). Apabila diperoleh koefisien korelasi ( $r$ ) nilainya positif ( $r > 0$ ) berarti hubungannya positif atau searah. Dalam artian lain apabila terjadi kenaikan pada variabel  $x$ , maka akan diikuti oleh kenaikan pada variabel  $y$ . begitu sebaliknya.

Bila diperoleh koefisien korelasi ( $r$ ) nilainya negatif ( $r < 0$ ) berarti hubungannya negatif atau berlawanan arah. Maksudnya, apabila terjadi kenaikan pada  $x$ , maka diikuti oleh penurunan pada  $y$ , begitu sebaliknya.

Dalam menghitung berapa besarnya kontribusi atau sumbangan dari variabel  $x$  terhadap naik turunnya variabel  $y$ , digunakan koefisien korelasi penentu atau koefisien determinasi ( $k_d$ ), rumusnya adalah :

$$k_d = r^2 \times 100\%$$

Misalnya bila diperoleh hasil dari  $r = 0,9$  maka  $k_d = (0,9)^2 \times 100\% = 81\%$ . Ini berarti kontribusi variabel  $x$  terhadap naik turunnya variabel  $y$  sebesar 81%, dan sisanya 19% adalah kontribusi dari faktor-faktor lainnya.

#### **3.3.5.4 Rancangan Pengujian Hipotesis**

Setelah itu dilakukan suatu pengujian hipotesis untuk mengetahui kebenarannya, apakah hipotesis yang kita peroleh itu benar atau tidak. Pengujian ini dilakukan karena hipotesis yang kita peroleh hanyalah suatu anggapan atau dugaan sementara yang kebenarannya belum pasti, sehingga diperlukan uji hipotesis. Uji hipotesis itu sendiri adalah suatu prosedur yang memungkinkan kita untuk mengambil keputusan, apakah keputusan itu diterima atau di tolak dari hipotesis yang kita peroleh tersebut.

Hipotesis yang akan diuji atau hipotesis kerja diberi simbol  $H_0$  dan hipotesis alternatif diberi simbol  $H_1$  yang akan diterima jika  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  akan ditolak jika  $H_0$  diterima. Pengujian hipotesisnya sebagai berikut :

- $H_0 : r_s \leq 0$  ; artinya Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (SPKPD) tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintahan
- $H_1: r_s > 0$  ; artinya Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (SPKPD) berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintahan

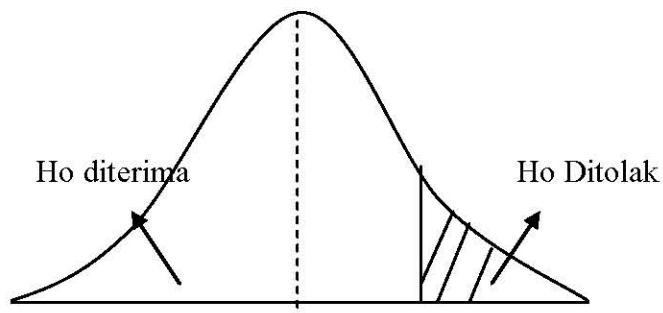
➤ Dengan ketentuan :

- Jika  $t \text{ hitung} \geq t \text{ tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.
- Jika  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

Tingkat signifikansi yang dipakai adalah 5%, karena dinilai cukup ketat untuk mewakili hubungan antara variabel-variabel tersebut. Selain itu tingkat signifikansi 5% secara umum digunakan untuk penelitian-penelitian pada ilmu sosial dan ekonomi. Nilai  $t$  tabel dapat diperoleh dari tabel dan untuk mencari  $t$  hitung digunakan rumus :

$$t \text{ hitung} = r_s \sqrt{\frac{n-2}{1-r_s^2}}$$

Setelah diperoleh hasil dari  $t$  hitung, maka nilai tersebut dibandingkan dengan  $t$  tabel yang diperoleh dari tabel distribusi  $t$ . Perbandingan ini kemudian digunakan untuk mengambil kesimpulan atau memutuskan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Data Responden

Kuesioner diberikan kepada 30 pegawai, dimana pengembalian kuesioner 100%, dalam arti seluruh kuesioner dikembalikan kembali kepada penulis.

Gambaran umum responden ini untuk mengetahui tentang karakteristik dari pegawai yang yang terpilih menjadi sample. Pengglongan pegawai didasarkan pada jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, masa kerja responden. Dari penggolongan ini dapat diperoleh suatu gambaran mengenai responden. Berikut data responden :

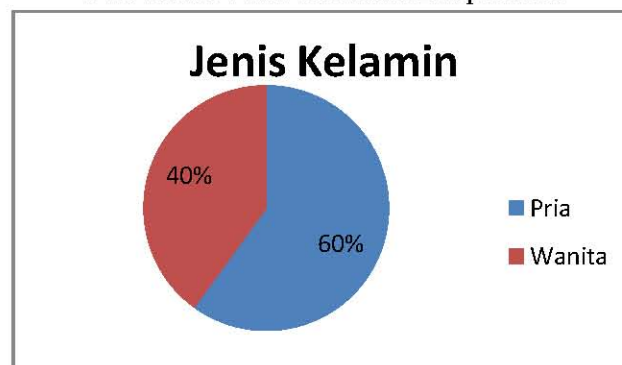
##### 4.1.1 Jenis Kelamin Responden

Tabel 4 – 1  
Jenis Kelamin Responden

No	Jenis kelamin	Frekuensi
1	Pria	18
2	Wanita	12
<b>Jumlah</b>		30

*Sumber : Data hasil pengolahan*

Gambar 4-1  
Persentase Jenis Kelamin Responden



Dari responden yang diteliti, seperti yang terlihat pada tabel diatas, terdapat responden pria sebanyak 60% (18 responden) dan wanita sebanyak 40% (12 responden).

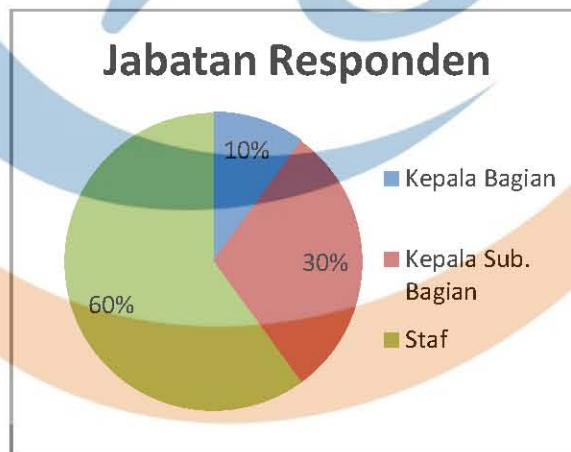
#### 4.1.2 Jabatan Responden

Tabel 4-2  
Tabel Jabatan Responden

No	Jabatan	Frekuensi
1	Kepala Bagian	3
2	Kapala Sub. Bagian	9
3	Staf	18
Jumlah		30

Sumber : Data hasil pengolahan

Gambar 4-2  
Presentase Jabatan Responden



Pada tabel dan kurva diatas kuesioner dibagikan kepada 10% (3 responden) kepada kepala bagian, 30% (9 responden) kepala Sub. Bagian, dan 60% (18 responden) diberikan kepada staf pegawai bagian akuntansi dan pelaporan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

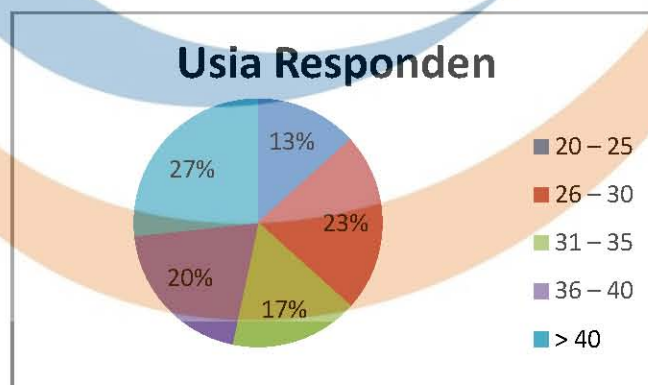
### 4.1.3 Usia Responden

Tabel 4 – 3  
Usia Responden

No	Usia	Frekuensi
1	20 – 25	4
2	26 – 30	7
3	31 – 35	5
4	36 – 40	6
5	> 40	8
<b>Jumlah</b>		30

Sumber : Data hasil pengolahan

Gambar 4-3  
Persentase Usia Responden



Pada tabel diatas dapat dilihat ternyata kebanyakan responden berusia lebih dari 40 tahun, sebesar 27% (8 responden), pada urutan kedua yaitu responden yang berusia 26-30 tahun 23% (7 responden), pada urutan ketiga yaitu responden yang berusia 36-40 tahun 20% (6 responden), pada urutan keempat yaitu responden yang berusia 31-35 tahun 17% (5 responden), pada urutan terakhir yaitu responden yang berusia antara 20-25 tahun 13% (4 responden).

#### 4.1.4 Tingkat Pendidikan Responden

Tabel 4 – 4  
Tingkat Pendidikan Responden

No	Pendidikan	Frekuensi
1	Diploma (D3)	6
2	S1	15
3	S2	9
4	S3	0
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>

Sumber : Data hasil pengolahan

Gambar 4-4  
Persentase Tingkat Pendidikan Responden



Dari tabel dan kurva diatas terlihat bahwa pendidikan terakhir responden kebanyakan adalah S1 yaitu 50% (15 responden), S2 yaitu 30% (9 responden), dan D3 yaitu 20% (6 responden), dan 0 responden yang pendidikan terakhirnya S3. Ini berarti rata-rata pegawai Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berpendidikan terakhir S1.

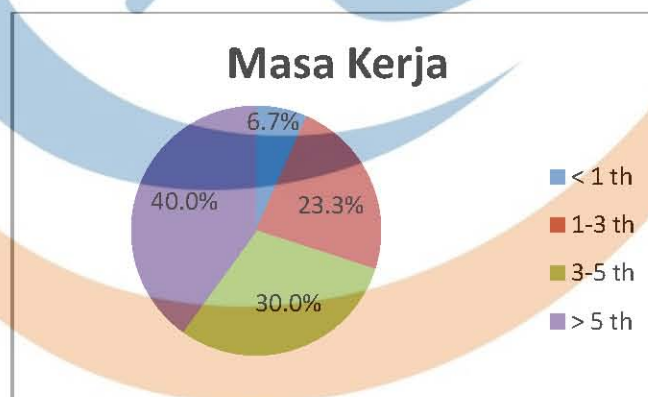
#### 4.1.5 Masa Kerja Responden

Tabel 4 – 5  
Masa Kerja Responden

No	Masa kerja	Frekuensi
1	< 1 th	2
2	1-3 th	7
3	3-5 th	9
4	> 5 th	12
<b>Jumlah</b>		30

Sumber : Data hasil pengolahan

Gambar 4-5  
Persentase Masa Kerja Responden



Pada tabel dan kurva diatas terlihat bahwa sebagian besar responden telah bekerja lebih dari 5 tahun yaitu 40% (12 responden), masa kerja 3-5 tahun sebanyak 30% (9 responden), masa kerja 1-3 tahun sebanyak 23,3% (7 responden), dan masa kerja kurang dari 1 tahun hanya 6,7% (2 responden). Hal ini membuktikan bahwa rata-rata pegawai loyalitas bekerja pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (SPKPD)**

Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (SPKPD) yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Barat telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sejak disahkan pada tahun 2005, Sistem pengelolaan mulai adanya perubahan diawali dengan pembuatan laporan realisasi anggaran telah dibuat secara komputerisasi. Dengan begitu, kesalahan pencatatan dan kesalahan lain dapat terdeteksi dengan cepat, sehingga dapat meminimalkan pekerjaan berulang-ulang.

Kebijakan daerah sangat memperhatikan peraturan-peraturan baru tentang pengelolaan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkannya selalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

Dari seluruh Jawa Barat, hanya Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sudah menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Manfaat dilakukannya sistem pengelolaan keuangan menurut Kasubbag keuangan adalah agar dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat menerapkan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar, standar dalam hal ini menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan, selain itu dalam menyusun laporan keuangan pun dapat lebih mudah dan cepat dilakukan, penelusuran dan koreksi lebih mudah terdeteksi, sehingga informasi yang diperlukan oleh pimpinan dapat terpenuhi.

Namun Demikian, sistem yang baik dapat dijalankan dengan optimal apabila tidak ada sumber daya manusia yang mampu melaksanakannya. Kurangnya personel di bagian keuangan dan masih rendahnya kualitas sumber daya manusianya yang berakibatkan kepada terhambatnya peningkatan pengelolaan keuangan daerah serta kurangnya koordinasi antar sub bagian di bagian keuangan, yang berakibatkan kesimpangsiuran informasi masalah pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut menjadi terhambat dalam pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan yang baik.

Dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi tersebut, bagian keuangan akan berupaya untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan anggaran yang telah dialokasikan sesuai dengan jenis program atau kegiatan yang ada dengan memperhatikan skala prioritas sebagaimana program kerja dan Arah Kebijakan Umum (AKU) yang telah tersusun.
- 2) Lebih meningkatkan koordinasi antar subbagian di bagian atau dalam skala yang lebih besar yang melibatkan seluruh personil bagian Keuangan sehingga adanya satu kesepakatan dan kesepahaman dalam menyingkapi masalah-masalah pengelolaan keuangan daerah.
- 3) Berusaha meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sudah ada dengan mengikutsertakan dalam diklat-diklat pengelolaan keuangan daerah, baik yang diselenggarakan oleh Depdagri maupun pihak-pihak lain, sehingga diharapkan meskipun dengan personil yang terbatas tapi kualitas personil meningkat sehingga dapat mengikuti perkembangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah telah sesuai dengan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan yang diatur berdasarkan SAP. Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan pun telah baik dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

## **4.2.2 Kualitas Pelaporan Keuangan**

### **4.2.2.1 Dapat Dipahami**

Dari hasil wawancara dan kuesioner dapat diketahui bahwa laporan keuangan secara umum telah dapat dimengerti. Walaupun didalamnya tetap memuat bahas teknis akuntansi yang sulit dipahami oleh pemakai laporan keuangan yang tidak memahami akuntansi dan keuangan. Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman laporan keuangan yang lebih tinggi, maka hal-hal yang kompleks dan rumit tidak dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Tetapi lebih diterjemahkan ke dalam bahasa yang lebih dapat dimengerti oleh pengguna

laporan keuangan dan dimasukkan sebagai penjelasan dalam pos-pos Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **4.2.2.2 Relevan**

Dari hasil wawancara dan kuesioner dapat diketahui bahwa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2005 telah dapat mengidentifikasi adanya kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Hal ini disebabkan, cukup stabilnya saldo akhir dan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sehingga telah dapat mencerminkan adanya kecenderungan (*trend*). Diharapkan dengan tercerminnya suatu *trend*, pemakai laporan keuangan dapat mengevaluasi posisi keuangan, laba bersih, arus kas, dan perubahan ekuitas secara proporsional.

*Extraordinary items* juga telah disajikan terpisah dengan pos-pos laporan keuangan yang biasa. Hal ini juga untuk memenuhi karakteristik laporan keuangan yang relevan, yaitu agar keputusan ekonomi yang diambil oleh pemakai laporan keuangan tidak menjadi salah keputusan ekonomi yang diambil oleh pemakai laporan keuangan tidak menjadi salah hanya karena dimasukkannya *extraordinary items* ke dalam pos-pos laporan keuangan yang lain. Laporan keuangan juga telah bebas salah saji yang material yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi laporan keuangan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa laporan keuangan telah memenuhi indikator karakteristik kualitatif relevan.

#### **4.2.2.3 Andal**

Dari hasil wawancara dan kuesioner dapat diketahui bahwa laporan keuangan telah bebas dari pengertian yang menyesatkan dalam arti tidak ada unsur laporan keuangan yang disalaharkan. Laporan keuangan juga dengan jujur mengungkapkan transaksi serta peristiwa pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan. Dalam menyusun laporan keuangan, perusahaan memenuhi prinsip *substance over form* dengan lebih mementingkan substansi dari transaksi tersebut daripada bentuk hukum. Laporan keuangan juga telah diarahkan kepada

kebutuhan umum pemakai laporan keuangan secara keseluruhan selain itu pembentukan cadangan piutang tak tertagih diteapkan perusahaan dengan kriteria tertentu dengan kebijakan akuntansinya, serta laporan keuangan telah bebas dari kesalahan tidak mencantumkan (*omissions*).

Berdasarkan hasil tersebut secara umum laporan keuangan telah memenuhi indikator karakteristik kualitatif andal.

#### **4.2.2.4 Dapat Dibandingkan**

Dari hasil wawancara dan kuesioner dapat diketahui bahwa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2008 telah cukup memenuhi karakteristik kualitatif *comparability* (dapat dibandingkan) dengan melakukan *restatement* pada setiap perubahan prinsip akuntansinya untuk dua tahun ke belakang pada tahun terjadinya perubahan. Begitu juga untuk setiap perubahan struktur kepemilikan pada entitas telah dilakukan *restatement* untuk dua tahun ke belakang pada tahun terjadinya perubahan.

### **4.3 Pengujian Data**

#### **4.3.1 Pengujian Validitas**

Pengujian validitas dilakukan untuk mengukur pernyataan-pernyataan yang ada dalam kuesioner. Suatu pernyataan dikatakan valid jika pernyataan tersebut mampu mengungkapkan apa saja yang hendak diukurnya.

Pengujian validitas dilakukan dengan mengkorelasikan antara skor yang diperoleh pada masing-masing pernyataan dengan skor faktornya. Koefisien korelasi tiap item akan dikonsultasikan dengan tabel harga *r Pearson Product Moment* dengan taraf signifikan 5% dan N30. Untuk kesalahan 5% uji dua pihak,  $dk = N - 2 = 28$ , maka diperoleh  $r_{tabel} = 0.374$ . Syarat suatu kuesioner dinyatakan valid jika  $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ . Hasil pengujian validitas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4-6

Tabel Validitas Variabel X dan Y

No. Item	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Kesimpulan
1	0,969	0.374	valid
2	0,989	0.374	valid
3	0,990	0.374	valid
4	0,991	0.374	valid
5	0,992	0.374	valid
6	0,989	0.374	valid
7	0,993	0.374	valid
8	0,986	0.374	valid
9	0,992	0.374	valid
10	0,990	0.374	valid
11	0,987	0.374	valid
12	0,989	0.374	valid
13	0,981	0.374	valid
14	0,981	0.374	valid
15	0,983	0.374	valid
16	0,983	0.374	valid
17	0,988	0.374	valid
18	0,987	0.374	valid
19	0,978	0.374	valid
20	0,989	0.374	valid
21	0,980	0.374	valid
22	0,984	0.374	valid
23	0,981	0.374	valid
24	0,981	0.374	valid
25	0,966	0.374	valid

### 4.3.2 Pengujian Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan sejauh mana kuesioner yang digunakan dapat dipercaya atau memberi perolehan hasil pengukuran yang relatif konsisten apabila alat ukur ini digunakan kembali dalam pengukuran gejala yang sama. Pengujian ini dilakukan untuk menganalisis data kuesioner apakah reliabel atau tidak reliabel. Dalam hal ini kuesioner yang disampaikan kepada responden haruslah berisi pertanyaan-pertanyaan yang jelas dan mudah dipahami.

Uji reliabilitas terhadap item-item kuesioner tersebut dilakukan dengan teknik belah dua (*Split Half Method*), yaitu dengan membagi item yang valid menjadi dua bagian. Item ganjil masuk belahan pertama dan item genap masuk belahan kedua. Setelah diperoleh skor total untuk data ganjil dan data genap, kemudian dicari korelasi antara item pernyataan ganjil dan pernyataan genap. Berikut merupakan rincian perhitungan korelasi antara item pernyataan ganjil dan item pernyataan genap.

Tabel 4-7  
Data Perhitungan Korelasi

No	Xi Genap	Yi Ganjil	(Xi - X) X	(Yi - Y) Y	X <sup>2</sup>	Y <sup>2</sup>	XY
1	65	48	4,6	1,0	21,5	1,0	4,6
2	58	45	-2,4	-2,0	5,6	4,0	4,7
3	66	49	5,6	2,0	31,8	4,0	11,3
4	63	46	2,6	-1,0	7,0	1,0	3,0
5	63	48	2,6	1,0	7,0	1,0	2,6
6	70	48	9,6	1,0	92,9	1,0	9,6
7	62	43	1,6	-4,0	2,7	16,0	8,0
8	64	45	3,6	-2,0	13,2	4,0	8,0
9	63	42	2,6	-5,0	7,0	25,0	15,0
10	49	47	-11,4	0,0	129,0	0,0	0,0
11	62	55	1,6	8,0	2,7	64,0	13,1
12	52	50	-8,4	3,0	69,9	9,0	24,0
13	55	51	-5,4	4,0	28,7	16,0	20,0
14	63	45	2,6	-2,0	7,0	4,0	-5,3
15	67	51	6,6	4,0	44,1	16,0	26,6
16	54	46	-6,4	-1,0	40,4	1,0	6,4
17	53	47	-7,4	0,0	54,2	0,0	0,0
18	67	43	6,6	-4,0	44,1	16,0	28,0

19	58	47	-2,4	0,0	5,6	0,0	0,0
20	61	52	0,6	5,0	0,4	25,0	3,2
21	63	48	2,6	1,0	7,0	1,0	2,6
22	60	43	-0,4	-4,0	0,1	16,0	1,4
23	59	42	-1,4	-5,0	1,8	25,0	6,8
24	58	44	-2,4	-3,0	5,6	9,0	7,1
25	60	54	-0,4	7,0	0,1	49,0	-2,5
26	65	41	4,6	-6,0	21,5	36,0	30,0
27	56	46	-4,4	-1,0	19,0	1,0	4,4
28	61	48	0,6	1,0	0,4	1,0	0,6
29	50	46	-10,4	-1,0	107,3	1,0	10,4
30	64	50	3,6	3,0	13,2	9,0	10,9
Jumlah					791,0	356,0	254,6
rata2 (X)	60,36	47					

$$r_{xy} = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}}$$

$$r = \frac{254,6}{\sqrt{(791)(356)}}$$

$$r = \frac{254,6}{530}$$

$$r = 0,480$$

Setelah dihitung dan didapat koefisien korelasinya yaitu sebesar 0,480, maka selanjutnya koefisien korelasi ini dimasukkan dalam rumus *Spearman Brown* :

$$r_i = \frac{2.r_b}{1+r_b}$$

$$r_i = \frac{2(0,480)}{1+0,480}$$

$$r_i = \frac{0,96}{1,480}$$

$$r_i = 0,648$$

Sehubungan dengan angka yang diperoleh diatas maka  $r_{hitung}$  sebesar 0,648. Sedangkan  $r_{tabel}$  dapat dilihat dari jalur responden yang berjumlah 30 orang pada tabel r *Product Moment Pearson* sebesar 0,361. Maka angka  $r_{hitung} > r_{tabel}$  ( $0,648 > 0,361$ ), sehingga semua pernyataan yang disusun adalah reliabel.

### 4.3.3 Tanggapan Responden Tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Melalui kuesioner yang disebarakan untuk keperluan penelitian ini dapat diketahui tanggapan responden terhadap Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SPKPD). Untuk memudahkan penilaian dari jawaban responden, maka dibuat kriteria penilaian dari jawaban responden sebagai berikut:

Sangat Diterapkan	dengan bobot = 5
Diterapkan	dengan bobot = 4
Kurang Diterapkan	dengan bobot = 3
Tidak Diterapkan	dengan bobot = 2
Sama Sekali Tidak Diterapkan	dengan bobot = 1

Selanjutnya dicari rata-rata dari setiap jawaban responden, untuk memudahkan penilaian dari rata-rata tersebut, digunakan interval untuk menentukan panjang kelas interval untuk menentukan panjang kelas interval, dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{\text{Rentang}}{\text{Banyak Kelas Interval}}$$

Dimana:

- P = Panjang kelas interval
- Rentang = Data terbesar – data terkecil
- Banyak kelas = 5

Berdasarkan rumus diatas, maka panjang kelas interval adalah:

$$P = \frac{5-1}{5} = 0,8$$

Maka interval dari criteria penilaian rata-rata adalah sebagai berikut:

1,00 – 1,79 = Sama Sekali Tidak Diterapkan

1,80 – 2,59 = Tidak Diterapkan

2,60 – 3,39 = Kurang Diterapkan

3,40 – 4,19 = Diterapkan

4,20 – 5,00 = Sangat Diterapkan

Tabel 4-8  
Analisis Responden Tentang  
Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

No	Tanggapan	SD	D	KD	TD	SSTD	Total score	Rata - rata	Ket
	Responden	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)			
	Pernyataan	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml			
1.	Untuk pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan, aktiva, kewajiban dan ekuitas menggunakan metode akrual.	0	3	12	15	0	78	2,60	Kurang Diterapkan
2.	Nilai asset tetap dicatat sesuai dengan jumlah yang dibayarkan atau diperoleh.	12	14	4	0	0	128	4,27	Sangat Diterapkan
3.	Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diterapkan, dan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang.	3	18	9	0	0	114	3,80	Diterapkan
4.	Bila nilai historis tidak	8	17	5	0	0	125	4,17	Diterap-

	dapat ditentukan maka dapat ditentukan dengan mengestimasi biaya.								kan
5.	Pendapatan yang tersedia telah diotorisasi melalui anggaran pemerintah selama satu tahun fiskal dan akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja pada periode tersebut.	4	21	5	0	0	119	3,97	Diterapkan
6.	Prinsip layak temu biaya-pendapatan ( <i>matching cost against revenue principle</i> ) tidak mendapat penekanan sebagaimana layaknya dalam akuntansi komersial.	13	13	4	0	0	129	4,30	Sangat Diterapkan
7.	Transaksi atau peristiwa-peristiwa lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realisasi ekonomi.	6	22	2	0	0	124	4,13	Diterapkan
8.	Bila terjadi perbedaan antara aspek ekonomi dengan aspek formalnya, hal tersebut dicatat dalam Catatan atas Laporan Keuangan.	13	11	6	0	0	127	4,23	Sangat Diterapkan
9.	Entitas pelaporan dibagi menjadi periode-periode pelaporan.	9	19	2	0	0	127	4,23	Sangat Diterapkan
10.	Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya	11	15	4	0	0	127	4,23	Sangat

	sekali dalam setahun.								Diterapkan
11	Metode akuntansi yang digunakan dari tahun ke tahunnya selalu sama.	8	13	9	0	0	119	3,97	Diterapkan
12	Laporan keuangan disajikan secara lengkap mengenai berbagai informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.	8	16	6	0	0	122	4,07	Sangat Diterapkan
13	Pengungkapan informasi ditempatkan di lembar muka laporan keuangan atau diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.	11	13	6	0	0	125	4,17	Diterapkan
14	Laporan keuangan telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	10	11	9	0	0	121	4,03	Diterapkan
15	Dalam menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, laporan keuangan tetap disajikan dengan wajar (asset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah).	14	8	8	0	0	126	4,20	Sangat Diterapkan

Total	60,37	Diterap- kan
Persentase	4,02	

*Sumber : Data hasil pengolahan*

Dari table 4 – 18 diatas, diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,02 yang artinya Diterapkan karena berada pada interval 3,40 – 4,19. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah sudah diterapkan dengan baik. Adapun nilai rata-rata tertinggi yang diperoleh adalah sebesar 4,30 yang terdapat pada pertanyaan Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*maching cost against revenue principle*) tidak mendapat penekanan sebagaimana layaknya dalam akuntansi komersial, sedangkan nilai terendah terdapat pada pertanyaan Untuk pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan, aktiva, kewajiban dan ekuitas menggunakan metode akrual, dengan nilai 2,60.

#### **4.3.4 Tanggapan Responden Tentang Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Melalui kuesioner yang disebarakan untuk keperluan penelitian ini dapat diketahui tanggapan responden terhadap kualitas pelaporan keuangan. Untuk memudahkan penilaian dari jawaban responden, maka dibuat kriteria penilaian dari jawaban responden sebagai berikut:

- Sangat Setuju dengan bobot = 5
- Setuju dengan bobot = 4
- Netral dengan bobot = 3
- Tidak Setuju dengan bobot = 2
- Sangat Tidak Setuju dengan bobot = 1

Selanjutnya dicari rata-rata dari setiap jawaban responden, untuk memudahkan penilaian dari rata-rata tersebut, digunakan interval untuk menentukan panjang kelas interval untuk menentukan panjang kelas interval, dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{\text{Rentang}}{\text{Banyak Kelas Interval}}$$

Dimana:

P = Panjang kelas interval

Rentang = Data terbesar – data terkecil

Banyak kelas = 5

Berdasarkan rumus diatas, maka panjang kelas interval adalah:

$$P = \frac{5-1}{5} = 0,8$$

Maka interval dari criteria penilaian rata-rata adalah sebagai berikut:

1,00 – 1,79 = Sangat Tidak Setuju

1,80 – 2,59 = Tidak Setuju

2,60 – 3,39 = Netral

3,40 – 4,19 = Setuju

4,20 – 5,00 = Sangat Setuju

Tabel 4 - 9

Analisis Responden Tentang

Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

No	Tanggapan	SS	S	N	TS	STS	Total score	Rata-rata	Ket
	Responden	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)			
	Pernyataan	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml			
16.	Informasi laporan keuangan memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu.	9	13	8	0	0	121	4,03	Setuju
17.	Penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan.	11	13	6	0	0	125	4,17	Setuju

18.	Informasi keuangan dapat digunakan untuk meramalkan kondisi atau perkembangan keuangan di masa mendatang.	10	15	5	0	0	125	4,17	Setuju
19.	Informasi keuangan memiliki tingkatan relevansi yang tinggi.	9	11	10	0	0	119	3,97	Setuju
20.	Informasi keuangan yang disajikan tepat waktu, dapat mempengaruhi penyajian laporan keuangan secara optimal.	7	21	2	0	0	125	4,17	Setuju
21.	Dalam penyajian laporan keuangan pada dasarnya terbebas dari pengertian yang menyesatkan sehingga dapat diandalkan.	17	8	5	0	0	132	4,40	Sangat Setuju
22.	Informasi keuangan memiliki tingkatan jauh dari kesalahan yang tinggi.	6	13	11	0	0	115	3,83	Setuju
23.	Yakin bahwa apabila laporan keuangan diukur kembali oleh pihak lain, maka akan memperoleh hasil yang tidak berbeda secara signifikan.	5	15	10	0	0	115	3,83	Setuju
24.	Laporan keuangan yang disajikan memang disajikan benar-benar	8	13	9	0	0	119	3,97	Setuju

	mencerminkan keadaan yang sesungguhnya tanpa dimaksudkan untuk menguntungkan pihak tertentu.								
25.	Dengan menggunakan metode yang sama laporan keuangan dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya maupun dengan Pemerintah Daerah lainnya.	8	11	11	0	0	117	3,90	Setuju
26	Dalam melakukan analisis terhadap laporan keuangan tidak mengalami kesulitan untuk memahami makna dari angka-angka yang tercantum dari laporan keuangan.	8	11	11	0	0	117	3,90	Setuju
27	Informasi yang dituangkan dalam laporan keuangan kurang membantu dalam memahami kondisi keuangan	0	5	10	15	0	80	2,67	Netral
	Total							47,00	Setuju
	Persentase							3,92	

*Sumber : Data hasil pengolahan*

Dari table 4 – 29 diatas, diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,92 yang artinya Setuju karena berada pada interval 3,40 – 4,19. Hal ini menunjukkan bahwa Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah sudah baik. Adapun nilai rata-rata tertinggi yang diperoleh adalah sebesar 4,40 yang terdapat pada pertanyaan

Dalam penyajian laporan keuangan pada dasarnya terbebas dari pengertian yang menyesatkan sehingga dapat diandalkan, sedangkan nilai terendah terdapat pada pertanyaan Informasi yang dituangkan dalam laporan keuangan kurang membantu dalam memahami kondisi keuangan dengan nilai 2,67.

#### 4.3.5 Analisis Koefisien Korelasi

Analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui peranan Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah dengan metode korelasi regresi linier sederhana,

Membandingkan  $r_s$  yang diperoleh dengan kriteria kekuatan hubungan seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2004) menyatakan bahwa :

0,00 – 0,199 maka hubungan sangat rendah

0,20 – 0,399 maka hubungan rendah

0,40 – 0,599 maka hubungan sedang

0,60 – 0,799 maka hubungan kuat

0,80 – 1,000 maka hubungan sangat kuat

Berdasarkan data yang diperoleh dari 30 responden yang mewakili populasi Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maka diperoleh hasil seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4 - 10

Analisis Perhitungan Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

No	X	Y	X <sup>2</sup>	Y <sup>2</sup>	XY
1	65	48	4225	2304	3120
2	58	45	3364	2025	2610
3	66	49	4356	2401	3234
4	63	46	3969	2116	2898
5	63	48	3969	2304	3024

6	70	48	4900	2304	3360
7	62	43	3844	1849	2666
8	64	45	4096	2025	2880
9	63	42	3969	1764	2646
10	49	47	2401	2209	2303
11	62	55	3844	3025	3410
12	52	50	2704	2500	2600
13	55	51	3025	2601	2805
14	63	45	3969	2025	2835
15	67	51	4489	2601	3577
16	54	46	2916	2116	2481
17	53	47	2809	2209	2529
18	67	43	4489	1849	2881
19	58	47	3364	2209	2726
20	61	52	3721	2704	3172
21	63	48	3969	2304	3024
22	60	43	3600	1849	2580
23	59	42	3481	1764	2487
24	58	44	3364	1936	2552
25	60	54	3600	2916	3240
26	65	41	4225	1681	2665
27	56	46	3136	2116	2676
28	61	48	3721	2304	2928
29	50	46	2500	2116	2350
30	64	50	4096	2500	3255
Jumlah	1811	1410	110115	66626	85514

Sumber : Data hasil pengolahan

Hasil perhitungan dengan menggunakan regresi linier sederhana, sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{n \cdot \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

$$r = \frac{30 \cdot (85515) - (1811)(1410)}{\sqrt{\{30(110115) - (1811)^2\} \{30(66626) - (1410)^2\}}} = 0,748$$

Melihat kepada skala pengaruh yang telah dikemukakan, dapat dikatakan bahwa dengan  $r$  sebesar 0,748 maka terdapat peranan kuat dan searah Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

#### 4.3.6 Koefisien Determinasi

Perhitungan koefisien determinasi diperlukan untuk mengetahui besarnya Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} Kd &= r_s^2 \cdot 100 \% \\ &= (0,748)^2 \cdot 100\% \\ &= 55,95\% \end{aligned}$$

Maka dari itu, besarnya peranan Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, sebesar 55,95% dan sisanya sebesar 44,05% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti, seperti pengaruh :

- 1) Penerapan *Good Corporate Government*.
- 2) Efektivitas pengawasan.
- 3) Budaya Organisasi pemerintahan.

#### 4.3.7 Pengujian Hipotesis

Agar dapat diketahui signifikansi atau tidaknya korelasi antara Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (SPKPD) dengan kualitas pelaporan keuangan, maka dilakukan statistik uji t dan hipotesis yang diajukan adalah :

$H_0$  :  $r_s \leq 0$  ; artinya Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah tidak berperan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah

$H_1$  :  $r_s > 0$  ; artinya Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah berperan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah

Ketentuan :

Jika t hitung  $>$  t tabel, maka  $H_0$  ditolak,  $H_1$  diterima

Jika t hitung  $<$  t tabel, maka  $H_0$  diterima,  $H_1$  ditolak

Dengan taraf nyata ( $\alpha$ ) = 0,05 ; N = 30

Derajat kebebasan (df) = 30-2 = 28, maka diperoleh nilai t tabel untuk uji satu pihak, yaitu dengan satu cara interpolasi :

$$t \text{ hitung} = r_s \sqrt{\frac{N-2}{1-r_s^2}} \qquad t \text{ tabel} = 2,048$$

$$= 0,748 \sqrt{\frac{30-2}{1-(0,748)^2}}$$

$$= 5,963$$

Membandingkan antara t hitung dan t tabel, maka dapat dilihat bahwa t hitung  $\geq$  t tabel, sehingga dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yang berarti terdapat peranan signifikan dari Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah

Daerah berperan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah Daerah penerimaan  $H_0$

Hipotesis yang diajukan pada Bab I yaitu : ” Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah berperan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah”, dapat diterima.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang didukung data dan informasi temuan yang disajikan dalam tulisan ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

##### **1) Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (SPKPD)**

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner, penulis lebih berfokus pada sistem pertanggungjawaban atau pelaporan keuangan, bahwa Sistem Pengelolaan Keuangan telah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan nilai rata-rata 4.02 yang berada pada interval 3,40-4,19 = Diterapkan.

Namun terdapat beberapa hal yang belum sepenuhnya diterapkan yakni, pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan, aktiva, kewajiban dan ekuitas, seharusnya telah menggunakan metode akrual murni, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam pasal 36 ayat (1). Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap metode ini

##### **2) Kualitas Pelaporan Keuangan**

Berdasarkan hasil uji kuesioner bahwa kualitas laporan keuangan rata-rata setuju, dengan nilai rata-rata 3,92 yang berada pada interval 3,40-4,19 = Setuju, hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan Setda Provinsi Jawa Barat telah baik.

Beberapa prasyarat normatif kualitas laporan keuangan juga telah dipenuhi, yaitu : dapat dipahami, relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

### 3) Peran SPKPD terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Berdasarkan hasil uji coba kuesioner peran Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki korelasi yang kuat terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah provinsi Jawa Barat, dengan  $r_{hitung}$  sebesar 0,748 yang berarti memiliki hubungan yang kuat. Hubungan yang kuat ini menunjukkan bahwa peran Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjang kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Besarnya pengaruh Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah daerah terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah sebesar 55,95%, sedangkan sisanya 44,05% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Hasil Penghitungan dari  $t_{hitung}$  didapat = 5,963, kemudian dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  2,048, karena nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  (5,963 > 2,048) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah berperan positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat direalisasikan. Adapun saran tersebut ialah :

### (1) Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat

- 1) Untuk Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pada bagian keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dapat dilakukan dengan cara :
  - a. Memberikan pelatihan kepada pegawai, terutama yang berhubungan dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
  - b. Memberikan penghargaan berupa peningkatan jabatan, piagam-piagam berharga, kepada pegawai yang telah berprestasi.

- 2) Lebih ditingkatkan dalam menetapkan anggaran secara tepat waktu.
- 3) Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

**(2) Bagi peneliti selanjutnya**

- 1) Meneliti faktor-faktor lain selain dari Sisten Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (SPKPD), yang dapat berperan bagi kualitas pelaporan keuangan daerah, seperti :
  - a. Faktor Penerapan *Good Corporate Government*.
  - b. Faktor Efektivitas pengawasan.
  - c. Faktor Budaya Organisasi pemerintahan.
- 2) Dapat juga melakukan penelitian serupa di lingkungan provinsi lainnya.

**5.3 Keterbatasan Peneliti**

Kesimpulan yang diambil peneliti hanya dibatasi pada bagian sistem pertanggungjawaban atau pelaporan saja, sedangkan pada Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (SPKPD) terdiri dari beberapa bagian sistem. Hal ini menjadi keterbatasan peneliti, dikarenakan untuk meneliti seluruh bagian Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (SPKPD) diperlukan pengetahuan yang lebih dan juga waktu yang terlampau lama.

## DAFTAR PUSTAKA

- **Buku :**

- Bastian, Indra. 2007. **Sistem Akuntansi Sektor Publik**. Jakarta : Salemba Empat.
- Nordiawan, Deddi. 2009. **Akuntansi Sektor Publik**. Jakarta : Salemba Empat.
- TIM PHK TIK. 2009. **Akuntansi Sektor Publik**. Bandung : Universitas Widyatama.
- Mardiasmo. 2004. **Akuntansi Sektor Publik**. Yogyakarta : Andi Offset.
- Halim, Abdul. 2004. **Akuntansi Keuangan Daerah**. Jakarta : Salemba Empat.
- Basuki. 2007. **Pengelolaan Keuangan Daerah**. Yogyakarta : Kreasi Wacana.
- Poerwodarminto. 1999. **Kamus Umum Bahasa Indonesia**. Balai Pustaka. Jakarta.
- Indriantoro Nur, Supomo, Bambang. 2002. **Metodologi Penelitian Bisnis**. Yogyakarta : BPF.
- JS Badudu, Sultan M Zein. 1994. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Nazir Muh. 2003. **Metode Penelitian Bisnis**. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sevilla, Consuelo G. 1993. **Pengantar Metode Penelitian**. Jakarta : UI PRESS.

- **Peraturan Pemerintah :**

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13. 2006. **Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**.
- Peraturan Pemerintahan No.24. 2005. **Standar Akuntansi Pemerintahan**.
- UU RI No 17. 2003. **Keuangan Negara**.
- UU RI No 1. 2004. **Perbendaharaan Negara**.
- UU RI No 15. 2004. **Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara**

Peraturan Pemerintah No 58. 2005. **Pengelolaan Keuangan Daerah.**

Keputusan Mendagri No 29. 2002. **Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.**

UU RI No 33. 2004. **Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.**

UU RI No 32. 2004. **Pemerintahan Daerah.**

- **Skripsi :**

Abdurachman, Dadang. 2007. **Analisis Mengenai Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrua Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Bandung.** Skripsi Tidak Diterbitkan. Bandung : Universitas Padjajaran.

Fatmawati, Mur Aita Aolihat. 2009. **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Pemerintahan Daerah.** Skripsi Tidak Diterbitkan. Bandung : Universitas Widyatama

- **Internet :**

www. KSAP.org

www. Wartaekonomi. Co.id

syukriy. Wordpress.com

[www.docstoc.com](http://www.docstoc.com)

linktodownload.com

[www.bppk.depkeu.go.id](http://www.bppk.depkeu.go.id)

astaqauliyah.com